

ABSTRAKSI

Eko Purnomo. NIM 201911058. **“Evaluasi Kebijakan Penataan PKL Oleh Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta”**. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Administrasi Negara, Universitas Surakarta, Tahun 2021.

Kebijakan Pemerintah Kota untuk mengatasi PKL, dengan peraturan yang sudah ada diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang indah, tertib dan teratur. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan, (2) sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan, (2) untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Laweyan, Dinas Perdagangan bidang Pengelola PKL dan Satpol PP Kota Surakarta. Fokus penelitian ini adalah kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan, sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah PKL di Laweyan, petugas Dinas Perdagangan bagian Pengelola PKL, petugas Satpol PP Kota Surakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah menjamurnya masalah PKL, Pemkot Surakarta mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008. Dalam pelaksanaannya, Perda tersebut dibantu oleh adanya Perwali Nomor 17B Tahun 2012 dan juga SK Walikota Nomor 510 Tahun 2012. Kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Surakarta melakukan pemberdayaan kepada PKL dalam bentuk pemberian bantuan gerobak, bantuan modal, penyuluhan dan juga bantuan gerobak dan payungnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL. Penataan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta kepada PKL berupa *shelterisasi*, yaitu para pedagang dibuatkan *shelter* oleh Pemkot untuk berdagang, relokasi yaitu pedagang dipindah tempat berjualannya dan juga pembatasan jam berjualan oleh Pemkot. Pendapatan PKL naik 30% dengan adanya relokasi, dengan *shelterisasi* pendapatan PKL naik sekitar 25% dan pembatasan jam berjualan meningkatkan pendapatan PKL 30-40% dari pendapatan semula. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot dalam upaya penataan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) PKL bekerjasama dengan pihak pengelola parkir, agar bisa menata parkir dengan baik sehingga tidak mengganggu ketertiban jalan, jalan terlihat rapi dan indah, (2) Pemkot dapat melakukan penataan dengan menggunakan tenda *konck down* (bongkar pasang) dan gerobak dorong untuk PKL.

Kata Kunci : Kebijakan, menata, PKL

ABSTRACT

Eko Purnomo. NIM 201911058. **"Evaluation of PKL Arrangement Policies by the Surakarta City Government in Laweyan District, Surakarta City"**. Faculty of Social and Political Sciences, State Administration, University of Surakarta, 2021.

The City Government's policy to deal with street vendors, with existing regulations, is expected to be able to create a beautiful, orderly and orderly environment. The problems in this study include: (1) how is the Surakarta City Government's policy in managing street vendors in Laweyan, (2) how far is the Surakarta City Government's policy in improving the welfare of street vendors. The aims of this study are: (1) to determine the policies of the Surakarta City Government in managing street vendors in Laweyan, (2) to determine the extent of the Surakarta City Government policies in improving the welfare of street vendors.

The approach used in this study is a qualitative approach. The research location is Laweyan, the Department of Market Management in the field of PKL Management and Satpol PP Surakarta City. The focus of this research is the policy of the Surakarta City Government in managing street vendors in Laweyan, the extent to which the Surakarta City Government policies in improving the welfare of street vendors. The primary data sources in this study were street vendors in Laweyan, officers from the Market Management Office of the PKL Managers, and Surakarta City Satpol PP officers.

The results showed that to overcome the problem of the proliferation of street vendors, the Surakarta City Government issued Regional Regulation Number 3 of 2008. In its implementation, the Regional Regulation was assisted by the existence of Perwali Number 17B of 2012 as well as Mayor's Decree Number 510 of 2012. Policies issued by the Surakarta City Government empowered the Street vendors in the form of providing assistance with carts, capital assistance, counseling and also assistance for carts and umbrellas. It aims to improve the welfare of street vendors. The arrangement carried out by the Surakarta City Government to PKL is in the form of sheltering, in which the traders are made shelters by the City Government to trade, relocation, namely traders are moved to their selling places and also restrictions on selling hours by the City Government. The income of street vendors increased by 30% with the relocation, with sheltering the income of street vendors increased by around 25% and restrictions on selling hours increased the income of street vendors by 30-40% of their original income. The policy issued by the City Government in an effort to organize street vendors aims to improve the welfare of street vendors.

Suggestions put forward in this study are (1) street vendors cooperate with parking managers, in order to be able to organize parking properly so as not to disturb the order of the road, the road looks neat and beautiful, (2) the city government can make arrangements by using konck down tents) and wheelbarrows for street vendors.

Keywords: Policy, managing, street vendors